



Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Menjaga Keamanan Nasional di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong

**Pertahankan Satu Negara, Dua Sistem
Kembalikan Stabilitas**



Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Menjaga Keamanan Nasional di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong

Deklarasi: Buklet ini memperkenalkan latar belakang pemberlakuan Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Menjaga Keamanan Nasional di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong, menguraikan isi utama, dan menjawab beberapa pertanyaan umum sehubungan dengan Undang-Undang tersebut.

Versi terjemahan hanya untuk referensi.

Jika ada perbedaan antara versi terjemahan dan versi asli, versi asli yang akan berlaku.

Kata pengantar

Rekan warga Hong Kong,

Saat kita merayakan ulang tahun ke-23 pembentukan Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong (“HKSAR”) Republik Rakyat Tiongkok (“PRC”), Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (“NPC”) telah mengesahkan “Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Menjaga Keamanan Nasional di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong” (“Undang-Undang Keamanan Nasional”) dan mencantumkan undang-undang tersebut dalam Lampiran III Undang-Undang Dasar sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar. Peraturan perundang-undangan tersebut juga telah diterapkan dengan cara diundangkan di HKSAR pada hari yang sama. Ini adalah langkah bersejarah untuk meningkatkan sistem bagi Hong Kong untuk menjaga kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan negara kita. Ini menetapkan arah yang jelas untuk membantu “Satu Negara, Dua Sistem” kembali ke jalurnya, dan menyatakan keputusan penting dan tepat waktu untuk memulihkan stabilitas di Hong Kong.

Selama sebulan terakhir ini, pejabat Daratan dan pakar hukum, tim pemerintahan saya dan saya, para pemimpin politik dan bisnis lokal dan anggota dari berbagai sektor masyarakat telah menjelaskan dari perspektif yang berbeda bahwa ini konstitusional, sah, rasional, dan masuk akal bagi Otoritas Pusat untuk memberlakukan undang-undang bagi Hong Kong untuk menjaga keamanan nasional. Pemberlakuan undang-undang tidak akan mempengaruhi tingkat otonomi yang tinggi, independensi peradilan, dan supremasi hukum di Hong Kong. Departemen Kehakiman akan terus bebas dari campur tangan dalam pekerjaan penuntutan pidananya. Hak dan kepentingan sah warga Hong Kong tidak akan diabaikan. Undang-undang tersebut hanya menargetkan minoritas yang sangat kecil dari orang-orang yang melakukan empat jenis kejahatan yang secara serius membahayakan keamanan nasional di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional, dan melindungi kehidupan dan harta benda, hak-hak dasar dan kebebasan sebagian besar warga negara.



Pemberlakuan undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong oleh Otoritas Pusat di tingkat nasional telah menarik banyak komentar memfitnah dan serangan jahat dari organisasi dan individu di dalam dan luar negeri disertai dengan tuduhan palsu dan tindakan mengancam yang biasa. Di tengah-tengah ini, saya mendorong semua orang untuk berhenti sejenak dan berpikir Siapa selain Pemerintah Rakyat Pusat (CPG) dan Pemerintah HKSAR yang gigih bertekad untuk memastikan penerapan efektif “Satu Negara, Dua Sistem”? Selama 23 tahun terakhir, bukankah negara kita, bukan negara asing atau kekuatan eksternal, yang telah mendukung perkembangan Hong Kong menjadi pusat keuangan, transportasi, dan perdagangan internasional? Dalam beberapa tahun terakhir, siapa yang telah mengabaikan kepentingan rakyat Hong Kong dengan secara terang-terangan menganjurkan “kemerdekaan Hong Kong”, “penentuan nasib sendiri”, dan “referendum”, dan memohon campur tangan dalam urusan Hong Kong oleh pemerintah asing atau bahkan sanksi terhadap Hong Kong? Tindakan dan aktivitas destruktif ini telah mengubah Hong Kong menjadi lubang menganga dalam keamanan nasional negara kita. Kemakmuran dan stabilitas kota kita juga terancam.

Undang-Undang Keamanan Nasional adalah titik balik bagi Hong Kong untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan dan memulihkan ketertiban dari kekacauan. Pemerintah HKSAR memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Keamanan Nasional, dan akan berusaha keras untuk memenuhinya . Dengan menetapkan dan meningkatkan sistem hukum dan mekanisme penegakan untuk menjaga keamanan nasional, Hong Kong akan dapat menghindari kerusakan dan kembali ke stabilitas. Bersama-sama, kita dapat meluncurkan kembali Hong Kong dan memajukan pembangunan kota.

Carrie Lam
Kepala Eksekutif
Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong



中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第三次会议



Latar belakang

- HKSAR adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari PRC.
- HKSAR adalah Wilayah Administrasi lokal PRC, yang akan menikmati otonomi tingkat tinggi dan berada langsung di bawah CPG.
- Undang-Undang Nasional yang berkaitan dengan pertahanan dan urusan luar negeri serta hal-hal lain di luar batas otonomi HKSAR berdasarkan Undang-Undang Dasar dapat dicantumkan dalam Lampiran III Undang-Undang Dasar, dan setiap undang-undang yang terdaftar akan diterapkan secara lokal dengan cara diundangkan atau dibuat peraturan perundang-undangan oleh HKSAR.
- Keamanan nasional adalah masalah dalam lingkup Otoritas Pusat. Apakah itu negara kesatuan atau federal, peraturan perundang-undangan tentang keamanan nasional selalu dilakukan oleh otoritas pusat dan bukan pemerintah daerah.
- NPC adalah organ kekuasaan negara tertinggi, dan keputusannya memiliki dampak hukum tertinggi. Dalam rangka menegakkan persatuan nasional dan keutuhan wilayah, menjaga kemakmuran dan stabilitas Hong Kong, dan dengan mempertimbangkan sejarah dan realitas Hong Kong, PRC telah membentuk HKSAR sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Konstitusi Negara Republik Rakyat Tiongkok (Konstitusi PRC). Sesuai dengan Pasal 62 Konstitusi PRC, sistem yang akan dilembagakan di HKSAR akan ditentukan oleh hukum yang ditetapkan oleh NPC dan NPC menjalankan kekuasaan untuk mengawasi penegakan Undang-Undang Dasar.

- Pasal 23 Undang-Undang Dasar adalah ketentuan tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan HKSAR. Ini menetapkan bahwa Hong Kong “Harus memberlakukan undang-undangnya sendiri” untuk melarang tujuh jenis tindakan dan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional. Ini adalah ketentuan wajib dan bukan klausul tentang pendelegasian kekuasaan. Ini menunjukkan kepercayaan yang dimiliki oleh Otoritas Pusat di HKSAR, tetapi tindakan kepercayaan ini tidak berarti bahwa Otoritas Pusat telah menyerahkan kekuasaan mereka dalam masalah keamanan nasional yang berada di bawah lingkup mereka.
- Menjaga keamanan nasional melalui peraturan perundang-undangan sejalan dengan praktik internasional. Di bawah Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta konstitusi sebagian besar negara di dunia, secara jelas ditetapkan bahwa pembatasan dapat dikenakan oleh hukum atas hak-hak dasar dan kebebasan tertentu individu untuk tujuan menjaga keamanan nasional.
- Undang-Undang Dasar Wilayah Administrasi Khusus Macau memuat pasal yang identik dengan Pasal 23. SAR Macau menyelesaikan peraturan perundang-undangan lokal pada tahun 2009 dan membentuk Komite Keamanan Nasional pada tahun 2018.
- Pada tahun 2003, Pemerintah HKSAR memperkenalkan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (Ketentuan Peraturan perundang-undangan) untuk menerapkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar, tetapi tidak berhasil. Sejak saat itu, pemberlakuan undang-undang lokal tentang keamanan nasional telah sangat tercoreng dan dianggap mengancam oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi, sehingga menyulitkan Pemerintah HKSAR untuk memulai pekerjaan yang relevan. Akibatnya, Hong Kong telah lama “tidak berdaya” dalam hal menjaga keamanan nasional dan karenanya menghadapi risiko yang cukup besar.





Perkembangan Terakhir

- “Satu Negara, Dua Sistem” adalah pengaturan kelembagaan terbaik untuk memastikan stabilitas jangka panjang Hong Kong. Namun demikian, pelaksanaannya telah menghadapi sejumlah masalah baru dalam beberapa tahun terakhir, termasuk tantangan terhadap hubungan antara HKSAR dan Otoritas Pusat, kebangkitan “nativisme” dan “kemerdekaan Hong Kong” yang diilhami oleh sentimen anti-Tiongkok, dan kerusuhan sosial yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh penentangan terhadap kebijakan Pemerintah, seperti “kampanye anti-pendidikan nasional” tahun 2012, “gerakan pendudukan” sebagai protes atas reformasi politik tahun 2014, “kerusuhan Mong Kok” tahun 2016, gangguan yang timbul dari oposisi terhadap amandemen peraturan perundang-undangan yang diusulkan untuk Ordonansi Pelanggar Buronan pada tahun 2019, dll. Tindakan dan kegiatan tersebut telah sangat merusak tatanan sosial, menyebarkan ide-ide radikal dengan jahat, dan melemahkan kesadaran warga Hong Kong yang taat hukum, terutama kaum muda.
- Sejak awal gangguan yang timbul dari penentangan terhadap amandemen peraturan perundang-undangan yang diusulkan terhadap Ordonansi Pelanggar Buronan pada Juni tahun lalu, masyarakat Hong Kong telah mengalami trauma. Kekerasan oleh perusuh telah meningkat, dengan senjata api dan bahan peledak ilegal menjadi ancaman teroris. Pasukan dan organisasi oposisi yang menganjurkan “kemerdekaan Hong Kong” dan “penentuan nasib sendiri” telah terang-terangan menantang wewenang Otoritas Pusat dan Pemerintah HKSAR, memohon campur tangan dalam urusan Hong Kong oleh kekuatan eksternal dan bahkan memohon sanksi terhadap Hong Kong sehingga mengabaikan kepentingan rakyat Hong Kong dan negara kita. Sementara itu, kekuatan eksternal telah mengintensifkan campur tangan mereka dalam urusan internal Hong Kong, mengesahkan undang-undang yang



berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, atau otonomi Hong Kong, dan secara terang-terangan mengagungkan tindakan radikal ilegal, yang semuanya secara serius membahayakan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan negara kita.

- Situasi di Hong Kong telah berkembang sedemikian rupa sehingga Otoritas Pusat tidak memiliki alternatif selain turun tangan dan mengambil tindakan. Dengan diadopsinya “Keputusan Kongres Rakyat Nasional tentang Pembentukan dan Peningkatan Sistem Hukum dan Mekanisme Penegakan Hukum Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong untuk Menjaga Keamanan Nasional” pada Sidang Ketiga NPC ke-13, Komite Tetap NPC telah diberi wewenang untuk membuat undang-undang yang relevan. Berdasarkan otorisasi dan mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya di Hong Kong serta umpan balik dari Pemerintah HKSAR dan semua sektor masyarakat, Komite Tetap NPC mengesahkan “Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Menjaga Keamanan Nasional di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong” pada pertemuan ke-20 pada tanggal 30 Juni untuk dimasukkan dalam Lampiran III Undang-Undang Dasar menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar. Undang-undang tersebut disahkan dan mulai berlaku pada hari yang sama di HKSAR.

Isi Utama Undang-undang

Tujuan Peraturan Perundang-undangan secara Jelas Menyatakan

- Untuk sepenuhnya dan setia menerapkan prinsip-prinsip “Satu Negara, Dua Sistem”, “Rakyat Hong Kong yang mengelola Hong Kong”, dan otonomi tingkat tinggi, untuk menjaga keamanan nasional, dan untuk mencegah, menekan, dan menghukum kejahatan yang terkait dengan HKSAR, yaitu tindakan pemisahan diri, subversi kekuasaan negara, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan teroris, dan kolusi dengan kekuatan asing atau eksternal untuk membahayakan keamanan nasional.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan

- Undang-Undang Keamanan Nasional dengan jelas menetapkan bahwa HKSAR akan melindungi hak dan kebebasan rakyat Hong Kong berdasarkan Undang-Undang Dasar serta ketentuan yang relevan dari Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana diterapkan di Hong Kong, termasuk kebebasan berbicara, pers, publikasi, berserikat, berkumpul, prosesi, dan demonstrasi.

Realisasi Supremasi Hukum yang Efektif

- Berikut ini adalah prinsip-prinsip penting supremasi hukum yang harus dipatuhi, antara lain:
 - Pidanaan dan menjatuhkan hukuman untuk kejahatan harus didefinisikan dengan baik dalam Undang-Undang: seseorang yang melakukan suatu tindakan yang merupakan pelanggaran menurut undang-undang harus dipidana dan dihukum sesuai dengan undang-undang. Tidak seorang pun dapat dipidana dan dihukum karena suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang.
 - Praduga tidak bersalah: seseorang dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah oleh badan peradilan.

- Non bis in idem: tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum lagi untuk suatu pelanggaran di mana ia telah dinyatakan bersalah atau dibebaskan dalam proses peradilan.
- Hak atas pengadilan yang adil: hak untuk membela diri dan hak-hak lain dalam proses peradilan yang menjadi hak tersangka kriminal, terdakwa, dan pihak lain dalam proses peradilan menurut hukum.
- Non-retrospektif: Undang-Undang Keamanan Nasional hanya berlaku untuk tindakan setelah dimulai.

Tugas dan Badan Pemerintah HKSAR dalam Menjaga Keamanan Nasional

- CPG memiliki tanggung jawab menyeluruh atas urusan keamanan nasional yang berkaitan dengan HKSAR.
- HKSAR memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga keamanan nasional dan akan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya – otoritas eksekutif, legislative, dan yudikatif harus secara efektif mencegah, menekan, dan menghukum tindakan dan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional sesuai dengan undang-undang yang relevan.
- HKSAR harus menyelesaikan sesegera mungkin undang-undang untuk menjaga keamanan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan menyempurnakan undang-undang yang relevan.
- Komite Penjaga Keamanan Nasional HKSAR yang diketuai oleh Kepala Eksekutif harus dibentuk untuk memikul tanggung jawab utama menjaga keamanan nasional di HKSAR. Ia berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada CPG.

Realisasi Penuh dari Supremasi hukum

- Pidanaan dan hukuman atas kejahatan harus didefinisikan dengan baik dalam undang-undang
- Praduga tak bersalah
- Perlindungan terhadap tuduhan ganda
- Pengadilan yang adil
- Tidak ada kekuatan retrospektif



- Anggota Komite meliputi: Sekretaris Kepala Administrasi, Sekretaris Keuangan, Sekretaris Kehakiman, Sekretaris Keamanan, Komisaris Polisi, kepala departemen untuk menjaga keamanan nasional Kepolisian Hong Kong yang ditetapkan berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nasional Keamanan, Direktur Imigrasi, Komisaris Bea dan Cukai, dan Direktur Kantor Kepala Eksekutif. Sekretariat di bawah Komite dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang akan ditunjuk oleh CPG setelah ditunjuk oleh Kepala Eksekutif.
- Tugas Komite Penjaga Keamanan Nasional HKSAR adalah untuk menganalisis dan menilai perkembangan terkait dengan menjaga keamanan nasional di HKSAR, membuat rencana kerja, dan merumuskan kebijakan, memajukan pengembangan sistem hukum, dan mekanisme penegakan, dan mengkoordinasikan pekerjaan besar dan operasi penting.
- Komite harus bebas dari campur tangan apa pun dalam menjalankan tugasnya dan informasi yang berkaitan dengan pekerjaannya tidak boleh diungkapkan kepada publik. Keputusan yang dibuat oleh Komite tidak dapat menerima peninjauan kembali.
- Komite Keamanan Nasional HKSAR harus memiliki Penasihat Keamanan Nasional, yang ditunjuk oleh CPG. Penasihat Keamanan Nasional akan duduk dalam rapat Komite dan memberikan nasihat tentang hal-hal yang relevan.
- Sebagai otoritas penegakan utama Undang-Undang Keamanan Nasional, Kepolisian Hong Kong dan Departemen Kehakiman Pemerintah HKSAR akan membentuk divisi khusus untuk menangani urusan keamanan nasional.

- Sekretaris Keuangan harus, atas persetujuan Kepala Eksekutif, mengalokasikan dana khusus dari pendapatan umum untuk memenuhi pengeluaran untuk menjaga keamanan nasional dan menyetujui penetapan pos-pos yang relevan, yang tidak tunduk pada pembatasan apa pun dalam ketentuan yang relevan dalam ketentuan undang-undang yang ada. Sekretaris Keuangan harus menyampaikan laporan tahunan tentang pengendalian dan pengelolaan dana untuk tujuan ini kepada Dewan Legislatif.

Kantor CPG di HKSAR tentang keamanan nasional

- CPG akan mendirikan Kantor Penjaga Keamanan Nasional CPG di HKSAR. Kantor bertanggung jawab untuk menganalisis dan menilai perkembangan dalam kaitannya dengan menjaga keamanan nasional di HKSAR dan memberikan pendapat dan membuat proposal tentang strategi utama dan kebijakan penting untuk menjaga keamanan nasional; mengawasi, membimbing, berkoordinasi dengan, dan memberikan dukungan kepada HKSAR dalam melaksanakan tugasnya menjaga keamanan nasional; mengumpulkan dan menganalisis intelijen dan informasi tentang keamanan nasional; dan menangani kasus-kasus tentang pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional sesuai dengan Undang-Undang Keamanan Nasional dalam keadaan tertentu (lihat di atas).
- Staf Kantor harus mematuhi hukum nasional serta hukum HKSAR, dan harus berada di bawah pengawasan otoritas pengawas nasional.
- Kantor ini harus membentuk mekanisme koordinasi dengan Komite Keamanan Nasional HKSAR dan akan membentuk mekanisme kerja sama dengan otoritas HKSAR yang relevan untuk meningkatkan pembagian informasi dan koordinasi operasi.
- Kantor ini akan didanai oleh CPG.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

1

Bagi Otoritas Pusat untuk turun tangan dan membuat undang-undang bagi HKSAR untuk menjaga keamanan nasional, apakah itu akan bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar dan merusak prinsip “Satu Negara, Dua Sistem”?

Jawabannya pasti tidak. Keamanan nasional selalu menjadi masalah yang berada di bawah lingkup Otoritas Pusat. Pasal 23 Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa Hong Kong “akan memberlakukan undang-undangnya sendiri” yang akan melarang tujuh jenis tindakan dan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional. Namun demikian, sudah 23 tahun sejak penyerahan Hong Kong dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 23 belum juga berlaku. Perkembangan terkini situasi Hong Kong sejak Juni tahun lalu telah sepenuhnya mengungkap celah hukum dan risiko nyata di Hong Kong dalam menjaga keamanan nasional. Tidak mungkin bagi Pemerintah Pusat untuk menutup mata terhadap situasi ini.



Ini menjadi kewajiban semua otoritas pusat untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi kehidupan, harta benda, hak, dan kebebasan rakyat. Pasal 3 “Keputusan Pembentukan dan Penyempurnaan Sistem Hukum dan Mekanisme Penegakan HKSAR Untuk Menjaga Keamanan Nasional” yang disahkan oleh NPC pada tanggal 28 Mei menekankan bahwa HKSAR harus menyelesaikan undang-undang keamanan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sedini mungkin. Undang-Undang Keamanan Nasional menegaskan kembali bahwa HKSAR harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pemberlakuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 23. Setelah menyelesaikan pekerjaan legislatif, Undang-Undang Keamanan Nasional yang disahkan oleh Komite Tetap NPC dan undang-undang HKSAR akan bersama-sama membentuk kerangka perlindungan hukum untuk menjaga keamanan nasional di HKSAR.

Pemerintah Pusat secara teguh memegang prinsip “Satu Negara, Dua Sistem”. Masyarakat Hong Kong harus memahami hubungan antara “Satu Negara” dan “Dua Sistem” dengan baik. “Satu Negara” adalah fondasi untuk “Dua Sistem”, dan fondasi ini akan sangat terguncang jika integritas teritorial terganggu dan keamanan nasional terancam. Sebaliknya, semakin kuat dasar keamanan nasional, semakin besar ruang untuk pembangunan di bawah “Satu Negara, Dua Sistem”.

Akankah Undang-Undang Keamanan Nasional merusak hak-hak dasar dan kebebasan prosesi, demonstrasi, pers, dan berbicara, antara lain, yang dinikmati oleh penduduk Hong Kong?

Tidak. Undang-Undang Keamanan Nasional berusaha untuk membelenggu hanya empat jenis tindakan dan kegiatan yang sangat membahayakan keamanan nasional saja. Ini menargetkan kaum minoritas yang sangat kecil dari orang-orang tanpa mempengaruhi hak-hak dasar dan kebebasan yang secara sah dinikmati oleh warga Hong Kong. Ketika menggunakan hak-hak ini, penduduk atau jurnalis Hong Kong tidak perlu khawatir selama mereka tidak melakukan pelanggaran pemisahan diri, subversi kekuasaan negara, organisasi, dan melakukan kegiatan teroris dan kolusi dengan kekuatan asing atau eksternal yang membahayakan keamanan nasional sebagaimana didefinisikan berdasarkan undang-undang.

Ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Keamanan Nasional bahwa prinsip menghormati dan melindungi hak asasi manusia harus ditegakkan dalam menjaga keamanan nasional dan hak-hak yang sah warga Hong Kong untuk menggunakan kebebasan berbicara mereka, seperti membuat pernyataan umum yang mengkritik kebijakan atau pejabat pemerintah, tidak boleh diganggu.

Namun relevan untuk dicatat bahwa berdasarkan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta konstitusi sebagian besar negara di dunia, secara jelas ditetapkan bahwa hak-hak dasar dan kebebasan tertentu individu dapat dibatasi melalui undang-undang untuk tujuan menjaga keamanan nasional.



Keputusan Kongres Rakyat Nasional untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk menjaga keamanan nasional HKSAR

- Menargetkan kaum minoritas yang sangat kecil untuk tindakan dan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional
- Melindungi kehidupan dan harta benda, hak-hak dasar dan kebebasan sebagian besar warga negara

Warga negara Hong Kong akan terus menikmati kebebasan berbicara, pers, berkumpul, berdemonstrasi, prosesi, dan memasuki atau meninggalkan Hong Kong yang sah.



3

Undang-Undang Keamanan Nasional menargetkan kolusi dengan kekuatan asing atau eksternal. Apakah undang-undang tersebut akan mempengaruhi aktivitas antara warga, organisasi, atau perusahaan Hong Kong dan rekan-rekan asing mereka terkait dengan pertukaran akademik, kontak agama, pertukaran budaya, perdagangan dan investasi, dll?

Tidak. Hak-hak dasar dan kebebasan warga negara Hong Kong, termasuk kebebasan untuk memasuki atau meninggalkan HKSAR, kebebasan hati nurani, kebebasan untuk terlibat dalam penelitian akademis, penciptaan sastra dan seni, dan kegiatan budaya lainnya, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan tidak akan terpengaruh. Pelanggaran pidana keamanan nasional saat berkolusi dengan kekuatan asing atau eksternal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keamanan Nasional hanya merujuk pada tindakan tertentu, yang telah didefinisikan secara jelas dalam undang-undang. Ini tidak akan mempengaruhi aktivitas pertukaran normal antara individu, organisasi, atau perusahaan dan rekan-rekan asing atau eksternal mereka, juga tidak akan menyebabkan siapa pun melanggar hukum secara tidak sengaja.



4

Mengapa HKSAR hanya memikul tanggung jawab utama tetapi bukan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga keamanan nasional? Mengapa Otoritas Pusat masih mempertahankan wilayah hukum atas kasus-kasus tertentu dalam "keadaan tertentu"?

Keamanan nasional adalah masalah dalam lingkup Otoritas Pusat. Di semua negara berdaulat, pemerintah pusat memikul tanggung jawab utama atas keamanan nasional dan bertanggung jawab atas manajemen terpusat dari masalah keamanan nasional.

24

Dalam menerapkan “Satu Negara, Dua Sistem”, “Rakyat Hong Kong yang mengelola Hong Kong” dan otonomi tingkat tinggi, HKSAR memikul tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan nasional. Ini menunjukkan kepercayaan penuh yang dimiliki Pemerintah Pusat terhadap HKSAR. Namun, tindakan kepercayaan ini tidak berarti bahwa Otoritas Pusat telah melepaskan tanggung jawab dan kekuasaan mereka dalam hal keamanan nasional. Faktanya, mengenai kejahatan yang membahayakan keamanan nasional dalam “keadaan tertentu”, mungkin ada kasus di mana penegak hukum dan organ peradilan di HKSAR mengalami kesulitan untuk menjalankan wilayah hukum. Misalnya, dalam situasi rumit di mana lembaga atau organisasi asing tertentu sangat terlibat dalam kasus

ini, atau ketika masalah pertahanan dan militer nasional terlibat, atau di mana perselisihan diplomatik akan terjadi, sulit bagi HKSAR sendiri untuk menyelidiki dan menangani secara menyeluruh. Jika kasus berada di luar kapasitas otoritas penegak hukum setempat, sangat penting bagi Otoritas Pusat untuk menjalankan wilayah hukum atas kasus tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional, kasus-kasus yang mengharuskan Otoritas Pusat untuk menjalankan wilayah hukum ditentukan dengan menggunakan kriteria objektif. Ini diperlakukan dengan sangat hati-hati.

Selanjutnya, alasan Otoritas Pusat mempertahankan wilayah hukum atas kasus-kasus tertentu dalam “keadaan tertentu” adalah untuk menghindari situasi paling ekstrem di mana hal-hal berada di luar kendali Pemerintah HKSAR yang mengharuskan penerapan Pasal 18(4) Undang-Undang Dasar, di mana Komite Tetap NPC memutuskan bahwa HKSAR dalam keadaan darurat, dan CPG kemudian dapat mengeluarkan perintah untuk menerapkan hukum nasional yang relevan di HKSAR.



5

Apakah pengaturan wilayah hukum tetap berdasarkan "keadaan tertentu" oleh Otoritas Pusat dan penunjukan hakim oleh Kepala Eksekutif untuk mengadili kasus keamanan nasional berarti ketidakpercayaan pada peradilan HKSAR? Dan apakah itu akan merusak independensi peradilan di Hong Kong?

Supremasi hukum dan independensi peradilan adalah salah satu unsur penting yang menjadi sandaran kesuksesan Hong Kong. HKSAR memiliki kekuasaan kehakiman yang independen, termasuk putusan akhir sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yang telah menjadi jangkar bagi sistem hukum Hong Kong dalam 23 tahun terakhir. Meskipun demikian, menjaga keamanan nasional adalah urusan Pemerintah Pusat, bukan urusan otonomi tingkat tinggi SAR. Pemerintah Pusat harus memastikan bahwa keamanan nasional dijaga secara menyeluruh dalam segala keadaan dan di mana saja. Pemerintah Pusat harus mempertahankan wilayah hukum dalam "keadaan tertentu" untuk menangani kasus-kasus yang membahayakan keamanan nasional yang berada di luar kapasitas HKSAR. Selain itu, pengadilan Hong Kong tidak memiliki wilayah hukum atas tindakan negara; dan pelaksanaan kekuasaan oleh Otoritas Pusat untuk menjaga keamanan nasional merupakan tindakan negara. Secara khusus diatur pada ayat tiga Pasal 19 Undang-Undang Dasar bahwa "pengadilan Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong tidak memiliki wilayah hukum atas tindakan negara seperti pertahanan dan urusan luar negeri."

Berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional, kasus-kasus yang membahayakan keamanan nasional yang terkait dengan Hong Kong akan ditangani oleh lembaga penegak hukum dan pengadilan HKSAR. Ketentuan tersebut akan dianggap sebagai pengaturan khusus yang mewujudkan "Satu Negara, Dua Sistem" seluas-luasnya, dan

menunjukkan kepercayaan yang dimiliki Pemerintah Pusat dalam otoritas eksekutif dan yudikatif SAR serta penghormatan terhadap kedua jenis sistem hukum tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar, hakim pengadilan dari berbagai tingkat HKSAR diangkat oleh Ketua Eksekutif sesuai dengan prosedur hukum. Ketua Eksekutif bertanggung jawab kepada CPG, jadi ini berada dalam lingkup Ketua Eksekutif untuk menunjuk hakim yang sesuai untuk mengadili kasus kejahatan yang membahayakan keamanan nasional.

Ketentuan tersebut tidak mempengaruhi independensi peradilan. Independensi peradilan berarti bahwa para hakim bebas dari campur tangan ketika benar-benar mengadili kasus, dan ketentuan yang relevan hanya menjelaskan bahwa Ketua Eksekutif akan menetapkan, di berbagai tingkat pengadilan, daftar hakim yang cocok untuk mengadili kasus-kasus yang membahayakan keamanan nasional, dan bukan memilih seorang hakim untuk memimpin kasus tertentu, dan Ketua Eksekutif dapat berkonsultasi dengan Komite untuk Menjaga Keamanan Nasional HKSAR dan Ketua Pengadilan Banding Akhir sebelum melakukannya. Selain itu, pembatasan tidak dikenakan pada kewarganegaraan para hakim, yang sepenuhnya menunjukkan penghormatan terhadap sistem peradilan HKSAR yang ada. (Tidak ada negara di dunia yang menggunakan praktik mengizinkan warga negara asing menjadi hakim untuk memimpin kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan nasional.)

Undang-Undang Keamanan Nasional juga dengan jelas menetapkan bahwa kasus keamanan nasional di bawah wilayah hukum HKSAR harus diproses sesuai dengan prosedur hukum Hong Kong saat ini. Oleh karena itu, ketika menangani kasus-kasus tertentu, Peradilan tetap akan memilih hakim dari daftar hakim yang ditunjuk di atas. Setiap tuduhan campur tangan terhadap independensi peradilan sama sekali tidak berdasar.



6

Mengapa perlu membentuk departemen khusus di Kepolisian Hong Kong dan Departemen Kehakiman untuk penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional? Apa yang akan menjadi sumber daya tenaga kerja yang relevan?

Sejak kembali ke Tanah Air, Hong Kong belum menerapkan mekanisme penegakan apa pun untuk menjaga keamanan nasional. Untuk menjaga keamanan nasional, banyak pekerjaan akan terlibat, seperti pengumpulan intelijen, analisis situasi, dan pengajuan penyelidikan dan penuntutan kasus, serta pekerjaan hukum terkait. Selain itu, personel yang bersangkutan perlu menerima pelatihan khusus dan mengumpulkan pengalaman yang relevan. Pemerintah HKSAR saat ini tidak dapat sepenuhnya menilai tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun, Undang-Undang Keamanan Nasional menetapkan bahwa, untuk memastikan bahwa sumber daya yang cukup akan tersedia untuk melaksanakan tugas, setelah disetujui oleh Kepala Eksekutif, Sekretaris Keuangan akan mengalokasikan dari dana pendapatan umum untuk membayar pengeluaran dan staf yang terlibat.



7

Undang-Undang Keamanan Nasional memungkinkan Kepolisian untuk mengambil tindakan tambahan. Apakah ini akan menghasilkan kekuasaan yang berlebihan bagi Polisi?

Negara-negara selalu mengatur semua tindakan efektif yang diperlukan bagi lembaga penegak hukum yang terlibat dalam keamanan nasional. Langkah-langkah yang diatur dalam Undang-Undang Keamanan Nasional diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif berbagai ketentuannya. Undang-Undang Keamanan Nasional memberi wewenang kepada Kepala Eksekutif untuk, bersama dengan Komite Penjaga Keamanan Nasional HKSAR, membuat aturan pelaksanaan yang relevan untuk tujuan penerapan tindakan oleh Polisi, dengan maksud untuk mencapai tujuan undang-undang, yaitu mencegah, menekan, dan menghukum perbuatan yang membahayakan keamanan nasional.



8

Akankah Penasihat Keamanan Nasional yang ditunjuk oleh Otoritas Pusat untuk duduk dalam rapat Komite Penjaga Keamanan Nasional HKSAR menjadi “Maha Guru”?

Keamanan nasional adalah masalah dalam lingkup Otoritas Pusat. Analisis informasi dan situasi yang terlibat jauh di luar kemampuan pemerintah daerah. Penasihat Keamanan Nasional yang ditunjuk oleh Otoritas Pusat hanya akan memberikan saran tentang pekerjaan HKSAR dalam menjaga keamanan nasional, dan hanya akan duduk di Komite Keamanan Nasional HKSAR yang diketuai oleh Kepala Eksekutif.



9

Apa kekuasaan penegakan hukum yang diberikan kepada Kantor Perlindungan Keamanan Nasional CPG di HKSAR? Apakah aparat penegak hukum Kantor terikat oleh hukum HKSAR?

Kekuasaan penegakan hukum Kantor secara jelas diatur dalam Undang-Undang Keamanan Nasional dan hanya dapat diterapkan dalam "keadaan tertentu". Pekerjaan dan tindakan penegakan hukum Kantor untuk menjaga keamanan nasional harus benar-benar mematuhi ketentuan hukum, fungsi undang-undang, dan prosedur undang-undang.

Undang-Undang Keamanan Nasional juga telah dengan jelas menetapkan bahwa Kantor harus menjalankan tugas secara ketat sesuai dengan hukum dan tunduk pada pengawasan otoritas pengawas nasional sesuai dengan undang-undang. Ini tidak boleh melanggar hak dan kepentingan yang sah dari individu atau organisasi mana pun. Staf Kantor juga harus mematuhi hukum HKSAR.



Akankah Undang-Undang Keamanan Nasional mengikis kepercayaan investor asing dan melemahkan Status Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional?

Kerusuhan sosial, kegagalan supremasi hukum, kurangnya perlindungan terhadap aset perusahaan dan keamanan pribadi adalah faktor asli yang akan merusak kepercayaan investor. Faktanya, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya peringkat internasional Hong Kong dalam satu tahun terakhir. Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Tiongkok Daratan semuanya telah memberlakukan undang-undang keamanan nasional, tetapi kami belum pernah mendengar bahwa undang-undang tersebut mempengaruhi perkembangan ekonomi dan lingkungan usaha negara-negara ini. Undang-Undang Keamanan Nasional dapat segera mengembalikan situasi kacau pada tahun lalu dan memulihkan stabilitas di Hong Kong, sehingga memperbaiki lingkungan usaha dan investasi Hong Kong. Kami sangat yakin bahwa hanya dengan keamanan nasional yang terjaga, Hong Kong dapat menikmati stabilitas dan keamanan jangka panjang. Oleh karena itu, undang-undang tersebut akan kondusif bagi Hong Kong untuk terus meningkatkan kekuatannya, menarik talenta luar negeri, memperkuat statusnya sebagai pusat keuangan internasional serta hub pelayaran dan perdagangan, selain memberikan dorongan untuk meningkatkan pengembangan inovasi dan teknologi.



Pertahankan dasar negara Kembalikan Hong Kong ke jalurnya

Menjaga Keamanan Nasional untuk Melestarikan “Satu Negara, Dua Sistem”



